

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang aman, tertib, tentram, serta sejahtera demi terciptanya suatu pembangunan. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib.¹

Namun dengan adanya tatanan ini tidak berarti Negara Republik Indonesia, khususnya Kota Sorong bebas dari tindak kejahatan. Akhir-akhir ini kejahatan terhadap harta benda khususnya perampasan sepeda motor dan benda berharga lainnya, yang disertai dengan kekerasan atau yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan *pembegalan*, marak sekali terjadi. Adanya tindakan kejahatan ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya yaitu kesulitan ekonomi para pelakunya.

Jenis tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang ada hampir dalam setiap daerah di Indonesia. Oleh karenanya menjadi sangat logis

¹ Satjipto Raharjo, 2003, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.13.

apabila jenis tindak pidana ini menempati urutan teratas diantara tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terdakwa / tertuduh dalam tindak pidana pencurian yang diajukan ke sidang pengadilan.²

Gaya hidup yang semakin beragam akibat pengaruh globalisasi, juga turut berkontribusi terhadap maraknya tindak kejahatan yang ada di Kota Sorong. Hal ini perlu mendapat perhatian serius, karena apa yang terjadi di Kota Sorong dan beberapa daerah di Pulau Jawa, dari waktu ke waktu semakin banyak tindak pidana berupa kejahatan yang dilakukan dan pada akhirnya sangat meresahkan masyarakat, maka perlu upaya pemberantasannya.

Aksi pencurian dan kekerasan di Kota Sorong semakin meresahkan masyarakat, mereka beraksi tak kenal waktu serta tempat. Hampir setiap hari terjadi pencurian kendaraan bermotor yang disertai dengan kekerasan, keadaan seperti ini semakin meningkat tajam setiap tahun. Pencegahan yang dilakukan pihak kepolisian belum sepenuhnya menjamin bahwa Kota Sorong bebas dari para pelaku tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan ini. Hal ini dikarenakan kurangnya upaya *preventif* dari pihak kepolisian, misalnya melakukan patroli di malam hari, melakukan razia, dll. Hal ini bertujuan agar dapat mengurangi angka kejahatan yang terjadi di Kota Sorong.

² Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm.13.

Dalam tindak pidana dengan kekerasan yang terjadi di Kota Sorong ini, para pelaku semakin nekat, sering melukai korbannya meski tidak melakukan perlawanan, dengan cara menjatuhkan korban saat berkendara. Umumnya mereka mengincar para wanita yang tengah mengendarai sepeda motor sendirian, bahkan tidak menutup kemungkinan bagi wanita yang sedang dibonceng.

Tindak kejahatan pencurian yang disertai dengan kekerasan ini dilakukan oleh seorang atau beberapa orang yang membentuk satu kelompok, terhadap orang yang sedang melintas di jalan dengan merampas harta benda miliknya yang disertai atau tanpa disertai dengan tindak kekerasan, bahkan tak jarang memakan korban jiwa. Hal ini dikarenakan korban terjatuh dari sepeda motor, lalu mengalami benturan di kepala serta lambatnya mendapat pertolongan. Tindak kejahatan seperti ini sering terjadi sehingga penduduk di daerah itu tidak berani memakai perhiasan saat berpergian.

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama, hukum itu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan.

Hukum Pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Namun upaya preventif tidak efektif dilaksanakan jika tidak diketahui apa sebenarnya yang menjadi sebab alasan seseorang melakukan tindak pidana.

Tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan diatur dalam KUHP Pasal 365 sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dikuasainya.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 - ke-1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - ke-2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - ke-3. jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - ke-4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan

luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Pada dasarnya KUHP di berbagai negara selain memuat perbuatan-perbuatan yang dilarang atau perbuatan-perbuatan yang diperintahkan, memuat asas-asas hukum pidana. Demikian pula KUHP yang kita miliki terdiri dari ketentuan-ketentuan umum yang berisi asas-asas, kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.³

Meskipun sudah diatur secara jelas sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 diatas, namun tindak pidana tersebut tidak berkurang, tetapi semakin meningkat.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian tentang, **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan” (Studi Putusan NO.268/PID.B/2016/PN.SON)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

³ Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.24.

Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada putusan perkara no.268/Pid.B/2016/PN Son?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk memperoleh data dan menganalisis penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada putusan NO.268/PID.B/2016/PN.SON.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dan kekerasan di Kota Sorong. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan tentang hukum pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat yang diperoleh dalam melakukan penelitian untuk penulisan hukum ini adalah sebagai sarana pendukung untuk mengembangkan ilmu hukum dalam penguasaan hukum pidana.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Manfaat penelitian bagi penegak hukum adalah untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian bagi masyarakat adalah untuk memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan kekerasan.

E. Keaslian Penulisan

Penelitian yang dilakukan penulis dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan No.268/Pid.B/2016/PN Son)” merupakan hasil karya asli dari penulis bukan plagiasi atau duplikasi dari penulisan hukum skripsi.

Sebagai perbandingan dapat dipaparkan beberapa hasil karya penelitian lain yang pernah ada. Berdasarkan pokok permasalahan dan hasil-hasil penelitian yang ada sebelumnya, dapat dilihat perbedaannya, sebagai berikut :

1. Nama : Maria Primirinda F.S
- Universitas : Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta
- NPM : 040508588
- Judul Skripsi : “Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pembegalan atau Pencurian Dengan Kekerasan”

a. Rumusan Masalah :

Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana pembegalan atau pencurian dengan kekerasan?

b. Tujuan :

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembegalan atau pencurian dengan kekerasan.

c. Hasil penelitian :

Pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembegalan atau pencurian dengan kekerasan harus disadari pasal 365 KUHP dengan pertimbangan-pertimbangan yang

memberatkan dan meringankan. Hakim sebagai pemegang keputusan bukan hanya dituntut pintar, namun dalam putusannya harus tepat dan adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Nama : Fathul Muhammad
Universitas : Fakultas Hukum Hassanudin Makassar
NPM : B111 12 150
Judul Skripsi : “Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2011-2015)”
- a. Rumusan Masalah :
- 1) Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di Kota Makassar ?
 - 2) Bagaimanakah upaya yang dilakukan aparat hukum untuk menanggulangi terjadinya kejahatan begal yang menggunakan Senjata Tajam di Kota Makassar ?
- b. Tujuan :
- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di Kota Makassar.

- 2) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan aparat hukum untuk menanggulangi terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di Kota Makassar.

c. Hasil Penelitian :

- 1) Bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan khususnya di kota Makassar adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, lemahnya penegakan hukum dan juga tak lepas dari kelalaian para korban pencurian.
- 2) Upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangnya adalah memberikan skala prioritas terhadap upaya preventif yaitu suatu upaya untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat. Selain itu, hal ini juga sekiranya tidak terlepas dari upaya represif karena upaya ini bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan kata lain usaha ini berwujud peningkatan terhadap lagi perbuatannya pelaku pencurian dengan kekerasan atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya secara konsisten agar tidak melakukan kejahatan lagi dan kalau

perlu hendaknya diberikan sanksi hukum yang berat agar pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut tidak mengulangi.

3. Nama : Sri Rinjani Arifin
Universitas : Fakultas Hukum Hassanudin Makassar
NPM : B111 09 149
Judul Skripsi : "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan NO.102/Pid.B/2012/PN.Sidrap)"
- a. Rumusan Masalah :
- 1) Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada putusan perkara No.102/Pid.B/2012/PN. Sidrap?
 - 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara No.102/Pid.B/2012/PN. Sidrap?
- b. Tujuan :
- 1) Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada putusan perkara No.102/Pid.B/2012/PN. Sidrap.

- 2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara No.102/Pid.B/2012/PN. Sidrap.

c. Hasil Penelitian :

- 1) Kebijakan hukum tentang *Dissenting Opinion* sangat berpengaruh karena tidak mengubah independensi hakim itu sendiri dan bersifat positif bagi para hakim yang tidak lagi terintervensi dalam memutuskan suatu perkara.
- 2) Dasar dan alasan pertimbangan hakim pada perkara tersebut adalah *Dissenting Opinion* sangat bersifat positif bagi peradilan khususnya dalam beracara. Karena adanya independensi kehakiman dan transparansi yang tidak berpengaruh pada hakim, dan tidak adanya intervensi lagi baik dari penuntut umum ataupun dari para penegak hukum lainnya.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep diperlukan agar pembahasan penelitian ini dapat terfokus dan tidak meluas. Adapun batasan konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan

Penerapan berarti:

- a. proses, cara, perbuatan menerapkan; b. pemasangan; c. pemanfaatan; perihal mempraktikan.⁴

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam hukum pidana positif berupa pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP.

3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana dalam KUHP terbagi menjadi 2, yaitu Pasal 55 dan 56 yang berisi :

- a. Pasal 55 ayat (1) dan (2), yaitu :

- (1) Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana:

Ke-1. mereka yang melakukan, yang menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ke-2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, saran atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- (2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

⁴ <http://kamusbahasaindonesia.org/penerapanKamusBahasaIndonesia.org>

b. Pasal 56 KUHP

Dipidana sebagai pembantu (medeplich-tige) sesuatu kejahatan :

- (1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waaktu kejahatan dilakukan;
- (2) mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

4. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan menurut KUHP Pasal 365 ayat (2) ke-2 secara tegas dijelaskan bahwa tindak pidana pencurian dan kekerasan, yaitu : “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif.

2. Sumber data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)
- b. Bahan hukum sekunder adalah, data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengelolaan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku, atau dokumentasi berupa putusan Pengadilan Negeri Sorong tahun 2016.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan kepustakaan dan memahami buku-buku literatur peraturan-peraturan, pendapat yang erat dengan materi yang ditulis terkait dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap narasumber sebagai wakil dari pemerintahan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum ini yaitu hakim Pengadilan Negeri Sorong untuk mengetahui tentang fakta-fakta, informasi, pendapat dan saran dari narasumber.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode analisis data menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan adalah metode deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya, telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi

Penulisan hukum/skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

2. BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai variabel pertama yaitu tinjauan umum tentang penerapan sanksi pidana, yang meliputi uraian tentang penerapan dan sanksi pidana, disamping itu bab II ini juga berisi variabel kedua tentang tinjauan umum mengenai pelaku tindak pidana, yang meliputi pembahasan tentang pengertian tindak pidana, pengertian pelaku, pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang dilengkapi dengan pembahasan putusan perkara Nomor.268/Pid.B/2016.PN.Son.

3. BAB III : PENUTUP

Pada bab ini, berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran merupakan hasil yang harus ditindaklanjuti.